

Budaya Lokal versus Islam: Perseteruan antara Bupati Purwakarta dan FPI dalam Kerangka Demokratisasi dan Desentralisasi

Yanwar Pribadi

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang

yanwarpribadi@bantenologi.org

Artikel diterima 10 Desember, diseleksi 20 Desember, dan disetujui 22 Desember 2016

Abstract

This paper explores the relationship between Islam and local culture in Indonesia in the framework of democratization and decentralization. It specifically focuses on the dispute between Islamic Defenders Front's (the FPI) leader, Habib Rizieq and the Regent of Purwakarta, Dedi Mulyadi together with the West Java Siliwangi Youth Wing (AMS). This paper shows that local leaders in decentralizing and democratizing Indonesia have involved in the turbulent political arenas, and this process in turn helps shape the contours of the country's political situation. This paper also shows that the on-going processes of decentralization and democratization have allowed for the emergence of new seemingly-autonomous local leaders, such as Dedi Mulyadi and Habib Rizieq. This paper argues that the rise of more overt expressions of Islamic piety and cultural resilience has shaped and characterized the identity politics of certain influential people's leaders.

Keywords: Local Culture, Local Politics, Islam, Democratization, Decentralization.

Pendahuluan

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, adalah produk nyata Era Reformasi (periode pasca Orde Baru setelah 1998). Ia memulai karir politiknya sebagai anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 – 2004. Namun, pada tahun 2003 ia

Abstrak

Makalah ini mengeksplorasi hubungan antara Islam dan budaya lokal di Indonesia dalam kerangka demokratisasi dan desentralisasi. Fokus spesifiknya adalah perseteruan antara pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq dan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi bersama-sama dengan Angkatan Muda Siliwangi (AMS). Makalah ini menunjukkan bahwa pemimpin lokal di Indonesia pada masa demokratisasi dan desentralisasi telah terlibat dalam arena politik yang bergejolak, dan proses tersebut telah membentuk watak situasi politik Indonesia. Makalah ini juga menunjukkan bahwa proses demokratisasi dan desentralisasi yang terus berjalan telah memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin lokal yang sepintas terlihat otonom, seperti Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq. Makalah ini berpendapat bahwa kemunculan ekspresi-ekspresi kesalehan Islam dan ketahanan budaya yang lebih terbuka telah membentuk dan memberikan karakter pada pemimpin massa tertentu yang berpengaruh.

Kata kunci: Budaya Lokal, Politik Lokal, Islam, Demokratisasi, Desentralisasi.

terpilih sebagai wakil bupati Purwakarta mendampingi Lily Hambali Hasan sebagai bupati untuk periode 2003 – 2008. Pada tahun 2008 ia memenangkan pilkada (pemilihan kepala daerah) langsung pertama di Purwakarta. Wakil bupatinya adalah Dudung B. Supardi. Pada periode berikutnya, 2013 – 2018,

ia kembali memenangkan pilkada di daerahnya. Kali ini wakilnya adalah Dadan Koswara. Nampaknya, Dedi Mulyadi adalah bupati yang unik. Ia ingin membuat Purwakarta menjadi ikon budaya Sunda yang kuat di Indonesia, dan untuk mewujudkan mimpinya, ia menggunakan simbol-simbol budaya pra- atau non-Islami, seperti mendirikan patung-patung pewayangan di sudut-sudut kota dan memberikan sarung penutup di pepohonan dengan pola hitam-putih, mirip dengan yang ada di Bali. Bahkan banyak yang mempercayai bahwa ia mengklaim telah menikahi Nyi Roro Kidul dan telah menyediakan kereta kuda untuk sang Ratu Pantai Selatan tersebut dalam acara festival budaya tahunan di Purwakarta.

Sementara itu, Muhammad Rizieq Shihab—dikenal sebagai Habib Rizieq—juga adalah produk Era Reformasi. Ia adalah pendiri Front Pembela Islam (FPI). Kedua orang tuanya adalah keturunan Arab Hadhrami. Sebelum mendirikan FPI, Habib Rizieq adalah seorang guru sekolah, anggota Jamiat Khair (organisasi sosial-keagamaan yang berperan penting dalam sejarah perjuangan Indonesia) dan pimpinan sejumlah majelis taklim. Ia adalah ketua FPI dari tahun 1998 hingga 2003, dan sejak 2003 ia menjadi ketua dewan Tanfidz (dewan eksekutif). Sejak tahun 2013 ia telah diangkat menjadi Imam Besar FPI seumur hidup.

Pada tanggal 13 November 2015 Habib Rizieq berceramah di Purwakarta. Ceramahnya kemudian menjadi sebuah kontroversi dan berkembang menjadi perselisihan yang dipicu oleh kata-kata Habib Rizieq yang dianggap menghina budaya Sunda melalui pelesetan ucapan salam masyarakat Sunda '*sampurasun*' (saya mohon dimaafkan/sempernakan diri Anda) menjadi '*campur racun*'.¹

¹Ucapan salam *sampurasun* saat ini hampir tidak dikenal di kalangan generasi muda orang Sunda di Jawa Barat. Kalangan yang lebih tua mengetahui ucapan salam tersebut, tetapi cenderung tidak menggunakannya. Penggunaan ucapan salam *assalamualaikum* jauh lebih populer di masyarakat Sunda. Hal inilah yang nampaknya men-

Angkatan Muda Siliwangi (AMS) merasa bahwa ceramah Habib Rizieq menghina masyarakat Sunda dan menuntut Habib Rizieq untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi isu yang lebih besar seperti demoralisasi, kemusyrikan, dan kekafiran yang melibatkan Dedi Mulyadi sebagai Bupati Purwakarta, Habib Rizieq sebagai pemimpin FPI, dan AMS sebagai pihak pertama yang mempermasalahkan isi ceramah yang dianggap berisi penghinaan tersebut.

Makalah ini mengeksplorasi perselisihan antara pemimpin FPI, Habib Rizieq versus Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi bersama dengan AMS sebagai sebuah studi kasus. Makalah ini tidak berusaha untuk menjelaskan politik lokal di Purwakarta atau Jawa Barat secara lebih luas, dan oleh karena itu ia hanya menganalisis satu studi kasus saja. Secara lebih luas, makalah ini meneliti hubungan antara Islam dan budaya lokal di Indonesia, dan secara lebih spesifik, makalah ini berusaha menjelaskan bagaimana makna perselisihan tersebut dalam konteks perkembangan politik lokal. Selanjutnya, makalah ini berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Bagaimanakah perselisihan tersebut berlangsung? Faktor-faktor apakah yang mendorong interaksi antara

jadi kekhawatiran Dedi Mulyadi bahwa mungkin saja ucapan salam tersebut akan hilang jika tidak digunakan sama sekali. Tidak diketahui dengan pasti sejak kapan ucapan salam *sampurasun* digunakan di Tanah Sunda dan bagaimana frekuensi penggunaannya. Penelitian yang mendalam tentang hal tersebut perlu dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang kebudayaan Sunda secara lebih komprehensif. Dedi Mulyadi sebagai pihak yang dituduh oleh Habib Rizieq sebagai orang yang berusaha untuk mengganti ucapan *assalamualaikum* dengan *sampurasun* dalam kehidupan sehari-hari, mengatakan dalam akun resmi Facebook-nya pada tanggal 25 November 2015 bahwa *sampurasun* berasal dari kata *sampurna ning ingsoh* yang memiliki makna "sempurnakan diri Anda". Selanjutnya, dikatakan bahwa "kesempurnaan diri adalah tugas kemanusiaan yang meliputi penyempurnaan pandangan, penyempurnaan pendengaran, penyempurnaan pengisapan, dan penyempurnaan penguapan yang semuanya bermuara pada kebenangan hati" dan "pancaran kebenangan hati akan mewujudkan sifat kasih sayang hidup manusia, maka orang Sunda menyebutnya sebagai ajaran Siliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh" (<http://regional.kompas.com/read/2015/11/26/05040061/Ramai.Dibicarakan.Ini.Makna.Sampurasun.Sesungguhnya>), diakses pada 27 Desember 2016.

Islam dan budaya lokal? Bagaimanakah bentuk-bentuk simbol Islam dan identitas budaya digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan ketidaksetujuan di dalam perselisihan tersebut? Sampai sejauh mana perselisihan tersebut mempengaruhi perkembangan dan dinamika demokrasi pada masa pasca Orde Baru? Makalah ini berpendapat bahwa kemunculan ekspresi-ekspresi kesalehan Islami dan ketahanan budaya yang lebih terang-terangan setelah reformasi politik 1998 telah membentuk dan memberikan karakter kepada politik identitas kelompok-kelompok tertentu yang di dalamnya terdapat pemimpin massa yang berpengaruh.

Penelitian yang dilakukan dalam makalah ini menggunakan studi pustaka. Perselisihan yang terjadi antara Habib Rizieq dengan Dedi Mulyadi bersama AMS ditelusuri melalui sumber-sumber tertulis yang berasal dari sumber periodikal yang ada di internet. Analisis yang dilakukan menggunakan pendekatan antropologi politik dengan fokus kepada konsep-konsep demokratisasi dan desentralisasi serta budaya lokal.

Perselisihan

Pada tanggal 13 November 2015, Habib Rizieq, bersama dengan sejumlah pimpinan FPI dan beberapa pengikut, memberikan ceramah di Purwakarta atas permintaan Kiai Muhammad Syahid Joban, pemimpin Majelis Dakwah Manhajus Sholihin (MS) dan Pesantren Ibnu Sina dalam sebuah acara khaul untuk memperingati hari kematian Kiai Abdullah bin Awood Joban, ayah Kiai Muhammad Syahid Joban. Ceramah tersebut berubah menjadi polemik dan berkembang menjadi perselisihan setelah direkam dan diunggah ke situs YouTube oleh Asep Muhammad Nazar, anggota MS. Di dalam video tersebut Habib Rizieq mencemooh kegemaran Dedi Mulyadi

akan budaya Sunda dan bukannya nilai-nilai Islami, terutama kecenderungan Dedi Mulyadi menggunakan salam tradisional Sunda *sampurasun*. Habib Rizieq mempelesetkan '*sampurasun*' menjadi '*campur racun*'.

Tidak lama setelah itu, AMS menjadi marah. Menurut Denda Alamsyah, Sekretaris Jenderal AMS, seorang anggota AMS secara tidak sengaja menghadiri ceramah Habib Rizieq dan mendengarkan kata-kata hinaan tersebut. Sehari setelah ceramah, video tersebut diunggah ke YouTube dan menyebar luas. AMS Purwakarta melaporkan dugaan penghinaan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMS di Bandung. Setelah mempelajari video tersebut, DPP AMS memutuskan untuk melaporkan penghinaan tersebut kepada polisi dan menuntut Habib Rizieq untuk diproses secara hukum. DPP AMS mengklaim bahwa Habib Rizieq telah menghina masyarakat Sunda karena *sampurasun* sebagai salam tradisional Sunda memiliki nilai-nilai luhur dan menjadi simbol kebanggaan orang Sunda. Habib Rizieq dilaporkan oleh DPP AMS ke Polda Jawa Barat pada 24 November 2015. Setelah memberikan laporan, DPP AMS mengadakan pertemuan dengan sejumlah organisasi masyarakat Sunda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat (AMSM) dan mereka menyetujui bahwa Habib Rizieq harus dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan harus mengakui kesalahannya serta meminta maaf karena kata-katanya yang menghina (<http://news.okezone.com/read/2015/11/26/525/1256154/kronologi-plesetan-sampurasun-hingga-pelaporan-ke-polda-jabar>, diakses pada 7 Juli 2016).

Selain *sampurasun*, Habib Rizieq juga menyerang Dedi Mulyadi karena alasan lain, yaitu isu yang lebih luas seperti demoralisasi, kemusyrikan, dan kekafiran. Dedi Mulyadi dituduh

telah mengubah Purwakarta menjadi daerah Sunda Wiwitan bahkan juga Hindu. Lebih jauh, ia juga disalahkan karena telah menghalang-halangi Purwakarta berubah menjadi kota syariah. Ia juga dituding merendahkan Islam sebagai tradisi asing yang berasal dari Arab Saudi (<http://news.okezone.com/read/2015/11/27/525/1257151/ini-isi-ceramah-habib-rizieq-saat-plesetkan-sampurasun?page=1>, diakses pada 8 Juli 2016).

Sementara itu, AMS menuduh Habib Rizieq menghina budaya Sunda dan di saat yang bersamaan Dedi Mulyadi menuntut Habib Rizieq meminta maaf atas ucapannya yang melecehkan masyarakat Sunda. Habib Rizieq merespon protes dari AMS dan kelompok-kelompok masyarakat Sunda lainnya dengan menegaskan bahwa orang Sunda harus berpikir jernih terhadap kata-katanya. Ia menjelaskan bahwa *sampurasun* adalah ucapan salam terhormat dan mengandung penghormatan kepada manusia. Selain itu, ia juga menyebutkan bahwa *sampurasun* dapat digunakan selama ia tidak menggantikan *assalamualaikum*. Ia mengkritik Dedi Mulyadi karena berusaha menggantikan *assalamualaikum* dengan *sampurasun* yang dianggap tidak islami (<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/26/08490071/Diprotes.karena.Pelesetkan.Sampurasun.Ini.Respons.Rizieq.Syihab>, diakses pada 7 Juli 2016). Hingga hari ini, perselisihan tersebut tidak menemui titik terang di tingkat hukum karena pihak aparat keamanan belum atau mungkin tidak mengambil tindakan yang jelas bagi kedua pihak.

Interaksi antara Islam dan budaya lokal

Politik lokal di Indonesia sering ditandai dengan adanya kompleksitas koeksistensi, pertumbuhan, perjalinan, dan persaingan antara Islam dan

elemen-elemen budaya lokal dalam hubungan yang pragmatis dan saling menguntungkan. Sebagai hasil proses reformasi yang terus berlanjut, interaksi antara Islam dan budaya lokal telah memasuki hubungan tahap baru. Seperti dalam kasus di banyak negara berkembang, nampak jelas bahwa keberadaan pemimpin lokal tradisional di era desentralisasi tidak dapat diabaikan karena pengaruh mereka yang signifikan. Kondisi di Jawa Barat mendorong interaksi antara segmen masyarakat yang penting di mana ulama dan pejabat pemerintah membentuk hubungan kompleks dalam perjuangan untuk memperoleh pengaruh; di mana simbol-simbol keislaman dan patronase memainkan peran penting. Menurut Hans Antlöv, struktur politik lokal yang diciptakan oleh Orde Baru di Jawa Barat terjadi berdasarkan hubungan individu yang erat dan juga adanya patronase (Antlöv, 2003: 196). Di Jawa Barat pada masa pasca Orde Baru, selain adanya pengecualian dan perubahan, kondisi yang ada nampaknya tidak banyak berubah, atau dengan kata lain, kontinuitas menunjukkan ciri-ciri yang jelas.

Secara umum, interaksi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia dapat dijelaskan sebagai sebuah arena kontestasi, terutama antara kekuatan-kekuatan keagamaan dan budaya, di mana pihak-pihak yang bersaing menggunakan simbol-simbol Islam dalam berinteraksi dengan masyarakat. Walaupun terkesan seperti praktik manipulatif, penggunaan simbol-simbol keislaman dianggap penting oleh masyarakat, terutama di Jawa Barat, karena secara umum orang Sunda mengidentifikasi diri mereka secara kuat dengan Islam. Segmen-segmen masyarakat yang berbeda merespon bentuk-bentuk interaksi tersebut menurut cara yang berbeda-beda. Politik lokal di Jawa Barat telah lama menjadi arena di mana pemimpin lokal memperoleh kekuasaan. Proses pembentukan 'state-

building' dan *'citizenship*' yang terus berlangsung, dalam era demokratisasi dan desentralisasi, telah memunculkan pemimpin lokal yang nampaknya otonom. Di Jawa Barat, ulama dan pejabat negara terus-menerus bersaing memperebutkan pengaruh dan memiliki kepentingan sendiri untuk memperoleh kekuasaan, pengaruh dan status sosial. Pada masa Orde Baru, kolaborasi antara ulama dan negara terutama muncul di bidang sosial-politik. Hal ini meminimalisasi peran politik ulama. Sejak keruntuhan pemerintahan Suharto, ulama telah mampu memperkuat visibilitas mereka dalam konstelasi politik, dan telah membuat mereka memiliki posisi penting dalam beragam ruang publik. Dalam urusan politis ini, sudah cukup biasa bagi ulama untuk membangun aliansi dengan pejabat negara untuk memperkuat kekuasaan mereka. Oleh karena itu, di Jawa Barat sering terjadi pertarungan antara ulama dan pejabat negara, atau antara kedua kelompok ini dengan pemerintah pusat. Di Jawa Barat kedua hal tersebut berlangsung terus-menerus dalam dinamika budaya politik lokal yang semakin hari semakin terasa intensif, terutama sejak Pemilihan Presiden 2014 yang sering dianggap memunculkan polarisasi massa antara golongan Islam dan kelompok sekuler-nasionalis.

Sebagai contoh dalam interaksi antara Islam dan budaya lokal, ulama dan pejabat dapat menghadiri acara-acara keagamaan, seperti khaul, slametan, dan ziarah dengan tujuan tidak hanya untuk urusan agama, tapi juga untuk tujuan sosial, politik, dan ekonomi. Pejabat terkemuka tidak ingin berada di bawah bayang-bayang ulama. Untuk tujuan politik, sebagai contoh pada masa Orde Baru, mereka dapat bekerja sama dengan ulama yang merupakan pendukung Golkar karena keduanya dikooptasi oleh partai penguasa tersebut. Pada masa pasca Suharto, mereka bekerja sama dengan ulama karena mereka memiliki

tujuan yang sama, yaitu memperoleh kekuasaan (Pribadi, 2015: 13).

Hubungan antara pemimpin keagamaan dan pejabat negara di Jawa Barat memang sangat kompleks. Perjuangan memperoleh pengaruh di antara elit-elit ini tidak hanya terpusat pada kesempatan untuk memperoleh keuntungan materi pribadi, tapi juga pada kompetisi politik yang tidak terlalu terorganisasi, pragmatis, dan sering saling menguntungkan. Kehadiran mereka secara terus-menerus pada masa pasca Suharto merefleksikan pengaruh mereka yang tetap terhadap masyarakat, dan kehadiran mereka sesuai dengan proses *'state building*' dan *'citizenship*'. Dalam perjuangan memperoleh pengaruh, simbol-simbol keislaman, kekayaan, dan genealogi digunakan secara meluas untuk memperoleh dukungan warga, sedangkan patronase dan hubungan personal menjadi pola umum dalam hubungan dengan warga.

Perselisihan antara Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq merupakan salah satu dampak dari hubungan antara Islam dan budaya lokal. Sejak lama Islam telah berinteraksi dengan budaya lokal, baik yang akhirnya berujung kepada konflik maupun akomodasi. Pada masa pasca Orde Baru, hubungan tersebut semakin memperlihatkan aspek politiknya dalam ranah pencarian hegemoni, dominasi dan kekuasaan yang dalam aspek-aspek secara umum, ketiganya hampir tidak dapat dibedakan.

Demokratisasi dan desentralisasi

Demokratisasi dan desentralisasi adalah dua proses yang terus berjalan dan berkembang di Indonesia. Keduanya muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan sentralisasi dan proses demokrasi yang tidak berfungsi dengan baik pada masa Orde Baru. Pertemuan antara Islam dan budaya

lokal yang sering memunculkan polemik, kontroversi dan perselisihan adalah salah satu dampak yang tidak terhindarkan dari kedua proses tersebut, termasuk perselisihan antara Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq. Demokratisasi dan desentralisasi adalah konsep yang perlu dipahami dalam menjelaskan pertemuan antara Islam dan budaya lokal pada masa pasca Orde Baru. Edward Aspinall dan Greg Fealy menjelaskan aspek-aspek hubungan antara pusat dan daerah pada masa pasca Orde Baru dan menunjukkan bahwa kemunculan kekuatan lokal telah mempengaruhi seluruh aspek politik, ekonomi dan masyarakat Indonesia (2003: 2).

Proses desentralisasi di Indonesia tidaklah sama dengan proses demokratisasi. Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken menginvestigasi peranan elit daerah, terutama dalam bidang birokrasi, ekonomi, dan politik identitas pada masa pasca Suharto. Argumen utama dalam karya mereka adalah bahwa desentralisasi tidak semata berujung pada demokratisasi, tata laksana pemerintahan yang baik dan penguatan masyarakat madani di tingkat daerah. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa yang lazim terjadi adalah desentralisasi korupsi, kolusi dan kekerasan politik yang dulunya hanya umum terjadi pada masa Orde Baru, dan sekarang dialihkan kepada pola-pola patrimonial di tingkat daerah (2007: 18).

Di banyak daerah, sejumlah elit politik nasional dan lokal yang muncul pada masa Orde Baru tetap dapat melanjutkan kiprah mereka di era baru ini. Hal tersebut menimbulkan keraguan mengenai perkembangan demokrasi di masa-masa awal Reformasi, terutama dengan dikuasainya lembaga-lembaga baru oleh mereka dan oleh kekuatan-kekuatan predatoris lainnya, dan juga tetap adanya alokasi kursi bagi militer di parlemen, sekaligus juga merebaknya

'*money politics*' dan korupsi (King, 2003; Malley, 2000; Malley, 2003). Namun, setelah keluarnya UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mulai berlaku pada bulan Oktober 2004 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung oleh pemilih bukan oleh parlemen—diimplementasikan pertama kali pada pilkada kabupaten/kota pada bulan Juni 2005—masyarakat dan pengamat mulai meyakini bahwa telah muncul demokrasi lokal yang didukung oleh elit politik dan masyarakat yang pada masa Orde Baru selalu ditolak (Ramage, 2007; Sulistiyono & Erb, 2009). Politik elektoral yang baru di Indonesia telah lahir, dan ia telah membentuk demokrasi elektoral yang baru dan kompleks di Indonesia (Pratikno, 2009; Qodari, 2005).

Presiden Habibie menghasilkan dua undang-undang yang sangat penting dalam proses desentralisasi di Indonesia: UUNo.22/1999 yang berhubungan dengan pendelegasian kewenangan politik dan UU No. 25/1999 yang mengatur urusan keuangan yang menguntungkan daerah yang pada akhirnya memulai era baru desentralisasi yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Di bawah suasana politik baru, pemerintah pusat diharuskan menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam semua bidang, kecuali bidang hubungan luar negeri; pertahanan dan keamanan; kebijakan keuangan; hukum; dan agama (Aspinall & Fealy, 2003: 3-4; Mietzner, 2010: 176).

Kebijakan desentralisasi ini telah membuat 'putra daerah' memiliki peran penting dalam menduduki posisi birokrat yang strategis. Kini menjadi sangat penting bagi fungsionaris dan kader Golkar dan juga aktor politik lainnya untuk merepresentasikan diri sebagai 'putra daerah' yang merepresentasikan kepentingan daerah dan bukannya kepentingan pusat. Ini juga yang menjadi keuntungan Dedi Mulyadi ketika merepresentasikan dirinya di Purwakarta

sebagai fungsionaris Golkar yang adalah 'putra Sunda' yang 'asli'. Menurut Schulte Nordholt dan Van Klinken, ciri khas identitas etnik dan keagamaan adalah sifat kedaerahan di Indonesia yang paling menonjol setelah runtuhnya Orde Baru. Etnisitas telah menjadi ideologi dalam perjuangan politik dan di saat yang bersamaan, ia juga telah membangkitkan perasaan yang mendalam bagi para pendukungnya (Schulte Nordholt & Van Klinken, 2007; 21). Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq nampaknya sangat lihai dalam berperan sebagai aktor sosial-politik yang mampu memainkan situasi dan kondisi yang telah berubah drastis sejak 1998 tersebut, dan tentu saja keduanya pun mampu membina hubungan yang saling menguntungkan dengan pendukung-pendukungnya.

Kini telah hampir dua dekade Indonesia menjalani masa Reformasi, dan ada banyak perubahan dramatis dalam konstelasi politik Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan penerapan desentralisasi fungsi pemerintahan. Ironisnya, ketika proses reformasi terus berjalan, sebuah "fitur patologis" pemerintahan sebelumnya, yaitu patronase, nampak telah menjadi karakter era pasca Orde Baru yang diadopsi (Mackie, 2010: 82-83). Pola patronase tersebut tidaklah statis karena ia telah dipengaruhi oleh proses '*state-building*'. Dalam beberapa hal, patronase diwariskan dari Orde Baru, sedangkan akarnya dapat dilacak hingga masa pra-kolonial. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah '*changing continuity*' (kesinambungan yang berubah) yang membantu menjelaskan masalah-masalah yang terhubung dengan desentralisasi dan pembentukan otonomi daerah (Schulte Nordholt, 2004: 30-31).

Dalam kasus Dedi Mulyadi versus Habib Rizieq, kehadiran keduanya pada masa pasca Orde Baru merefleksikan pengaruh mereka di masyarakat,

dan kehadiran mereka sesuai dengan proses '*state-building*' yang terus berjalan. Desentralisasi telah membuat kemunculan pemimpin lokal yang otonom. Cara mereka bertahan dan terus menjalankan kekuasaannya di masyarakat tidaklah mengejutkan. Ada dua alasan untuk hal tersebut. Pertama, hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu menyesuaikan diri mereka dengan atmosfer politik Indonesia yang terus berubah. Kedua, mereka terus dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai dan norma-norma mereka. Alasan yang pertama mengindikasikan bahwa pembentukan masyarakat madani masih terganggu oleh kehadiran sistem negara yang tidak efektif. Alasan kedua menjelaskan bahwa nilai-nilai dan norma-norma masyarakat Jawa Barat dan juga nilai-nilai agama Islam adalah benteng pertahanan terakhir mereka dalam "pertempuran" melawan modernitas.

Makna perselisihan dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi

Setelah reformasi politik pada tahun 1998, Indonesia telah mengalami transformasi sosial-politik yang tidak ada hentinya yang pada akhirnya telah membentuk dan memberi karakter pada politik lokal dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi. Periode pasca Orde Baru ini telah memperlihatkan suasana politik yang semakin hangat di mana masyarakat kini mampu menyuarakan kepedulian sosial-politik mereka. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi pada masa pemerintahan sebelumnya ketika negara secara terus-menerus mencoba mengintervensi seluruh aspek kehidupan warga negaranya. Kekuasaan negara bergantung pada dominasi kontrol terhadap wilayah publik dan privat. Di dalam masyarakat di mana tradisi dan adat identik dengan Islam, peranan pemimpin keagamaan untuk menginterpretasi,

mensor, dan menyebarluaskan persepsi politik sangatlah terlihat jelas.

Sejak bergulirnya Era Reformasi, tepatnya setelah tahun 1999, sebuah era desentralisasi telah menggantikan periode sentralisasi yang terlihat mengabaikan peranan daerah. Menurut agen-agen pembangunan internasional dan LSM, desentralisasi dianggap mendukung tata laksana pemerintahan yang baik (Schulte Nordholt, 2004), terutama di tingkat lokal. Menurut Vedi Hadiz, kondisi politik Indonesia di era desentralisasi ditandai dengan adanya dinamika politik utama yang terjadi di tingkat lokal (Hadiz, 2010). Di daerah telah muncul sebuah ekspektasi di mana ketika negara menyerahkan kontrolnya, di sana muncul kesempatan sosial-politik bagi masyarakat sipil untuk mengorganisasi dan menuntut praktik-praktik pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel (Fung and Wright, 2003).

Lalu, bagaimanakah perseteruan antara Habib Rizieq versus Dedi Mulyadi atau pertemuan antara Islam dan budaya lokal berpengaruh terhadap proses demokratisasi dan desentralisasi yang sedang berlangsung saat ini? Nankyung Choi dalam penelitiannya mengenai politik lokal di Pontianak memberikan kesimpulan yang paradoksikal. Di satu sisi, ia berpendapat bahwa proses diversifikasi elit lokal terlihat di pemerintahan tingkat menengah dan bawah. Di sisi lain, perkembangan ini tidak berarti menandakan adanya masyarakat yang lebih demokratis, karena baik elit lokal baru dan lama memperlakukan politik elektoral sebagai sebuah cara untuk mengembangkan dan mengeksploitasi jaringan patronase, seperti di negara-negara demokrasi lainnya (Choi 2014: 367).

Pertentangan etnis dan keagamaan sering melibatkan asumsi-asumsi mengenai agama dan pertimbangan tentang budaya tertentu terhadap

masyarakat yang dominan. Apa yang menjadi temuan Jane Monnig Atkinson pada orang Wana, masyarakat peladang di dataran tinggi Sulawesi Tengah bagian timur, adalah sebuah respon yang inovatif terhadap seperangkat konvensi yang ia sebut sebagai "*civil religion*" Indonesia. Dengan menciptakan sebuah makna tentang apa itu "agama", berdasarkan transaksi mereka dengan masyarakat dominan, mereka telah membangun sebuah "agama" untuk mereka sendiri yang berbeda dengan agama tetangga mereka yang memeluk Islam dan Kristen. Memang benar penggunaan agama sebagai penanda etnis terdokumentasi dengan baik di banyak literatur. Namun, kasus orang Wana membuat pengakuan akan adanya fakta bahwa signifikansi "agama" bagi kelompok etnis di tiap sisi batasan budaya mungkin tidak terbukti atau tidak sama. Sangatlah esensial untuk melampaui penjelasan fungsional mengenai penggunaan agama dalam kasus tersebut (Atkinson, 1983: 685).

Pentingnya agama dalam kontestasi antara agama dan budaya lokal di daerah tentunya tidak bisa dilepaskan dari kuatnya pengaruh Orde Baru dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana elit-elit daerah, baik elit agama, budaya, maupun pejabat lokal berinteraksi dengan pemerintah pusat. Seorang penulis menekankan kondisi ini dengan menekankan bahwa walaupun infiltrasi mendalam Orde Baru ke dalam masyarakat dan dominasinya terhadap masyarakat lokal jauh lebih kuat dibandingkan pemerintah kolonial Belanda, elit daerah menunjukkan kekuatan luar biasa dan mampu bertahan (Schulte Nordholt, 2003: 575). Oleh karena itu, elit-elit lokal tersebut (elit non-agama) tidak muncul sebagai ancaman signifikan kepada pemerintah karena ketergantungan mereka kepada subsidi dan keuntungan material lainnya serta kelemahan mereka ketika berhadapan dengan masyarakat. Pada prinsipnya, pemerintah Orde

Baru memelihara patronase dengan elit lokal untuk menjamin kelanjutan pemerintahannya di tingkat lokal (James, 1990: 20).

Aspirasi sosial-politik Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq pada masa pasca Suharto nampak mengindikasikan pragmatisme dan populisme pemimpin masyarakat sebagai broker kekuasaan. Ketika kesempatan yang menguntungkan datang, mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka, walaupun mereka mungkin beresiko kehilangan posisi terhormat mereka di masyarakat. Pragmatisme dan populisme mereka juga menunjukkan kemampuan pemimpin masyarakat sebagai individu-individu yang mampu menempatkan diri mereka di mata banyak orang. Mereka cenderung untuk mengamankan tempat mereka di masyarakat untuk tidak terjebak dalam pilihan politik yang salah. Jadi, ketika ada kesempatan politik (seperti dalam kasus pasca keruntuhan Orde Baru), mereka mengetahui cara untuk menyuarkan aspirasi politik mereka atau mereka mengetahui bagaimana masyarakat akan menyuarkan aspirasi mereka.

Penggunaan elemen-elemen keagamaan oleh elit-elit keagamaan diarahkan untuk melindungi modal politik dan ekonomi mereka. Sebaliknya, pemimpin formal lokal pada masa desentralisasi juga semakin menunjukkan tingkat pragmatisme politik yang tinggi, terutama ketika berkaitan dengan isu-isu keagamaan. Usaha Dedi Mulyadi mempertahankan unsur-unsur budaya Sunda juga bukan tanpa aspek pragmatisme. Nampaknya posisinya yang merupakan pejabat petahana membuatnya lebih leluasa untuk bereksperimen dengan manuver-manuver politiknya yang dari luar secara sekilas bertabrakan dengan Islam. Justru kebijakan politiknya, setidaknya hingga saat ini, nampak berhasil merengkuh

lebih banyak Muslim yang mulai jenuh dengan Islam politik (*political Islam* atau *Islamism*)² yang semakin bergerak liar dan kehilangan esensinya sebagai penantang kelompok sekuler-nasionalis dilihat dari sisi ideologi, walaupun dalam jumlah pengikut golongan Islam nampak semakin bertambah banyak di berbagai daerah.

Secara umum, manuver-manuver politik keduanya mencerminkan adanya tanda-tanda kemunculan demokrasi liberal (bukan liberalisme sebagai sebuah ideologi) yang sesungguhnya, di mana segmen-segmen masyarakat, terutama yang mewakili atau dianggap mewakili warga, mampu menyuarkan aspirasi mereka. Hal tersebut sejalan juga dengan kondisi pasca 1998 bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan yang cepat dan fundamental dalam hubungan sehari-hari antara Islam dan politik. Namun, di sisi lain, hal tersebut juga menandakan adanya atau munculnya islamisasi politik, kemunculan Islam politik, dan tumbuhnya fundamentalisme Islam politik modern yang mengkalim penciptaan (kembali) masyarakat Islam yang sesungguhnya. Selain itu, juga di sisi lain, manuver-manuver politik keduanya yang dari permukaan nampak berbicara atas nama warga, sesungguhnya jika ditinjau jauh lebih dalam sering kali tidak melibatkan atau bahkan tidak banyak membawa keuntungan untuk warga karena adanya pengaruh pragmatisme politik tokoh-tokoh yang melakukan manuver-manuver politik yang justru lebih kental dalam membentuk dasar tindakannya. Akhirnya, dalam banyak hal, manuver-manuver politik tersebut justru sering menghalangi kemunculan masyarakat madani karena seringkali warga tidak mendapat kesempatan untuk menyuarkan aspirasinya karena pemimpin-pemimpin rakyat tersebut merasa sudah mewakili suara rakyat.

² Untuk penjelasan yang lebih komprehensif tentang *political Islam*, lihat Ayoob, 2011.

Kesimpulan

Perselisihan antara Dedi Mulyadi beserta AMS dan Habib Rizieq merupakan salah satu bentuk atau dampak dari proses demokratisasi sekaligus desentralisasi di mana segmen-segmen masyarakat semakin memiliki banyak saluran untuk menyuarakan aspirasi mereka. Dalam proses demokratisasi, pertemuan antara Islam dan budaya lokal yang menjurus kepada persaingan dan perjuangan memperoleh hegemoni merupakan salah satu pertemuan yang sering berujung kepada perselisihan di banyak daerah. Kelompok-kelompok sosial-politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, seperti LSM, organisasi mahasiswa, dan serikat pekerja sering membawa permasalahan publik ke tangan mereka, seperti dalam urusan yang berhubungan dengan sengketa tanah, HAM, dan korupsi. Hal ini pulalah yang terjadi dalam perselisihan antara Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq. Yang jelas terlihat adalah bahwa perselisihan ini adalah "permainan" tingkat elit yang sering hanya melibatkan warga sebagai "pemain figuran" yang tidak menikmati euforia pasca Orde Baru yang tidak terlibat dalam partisipasi politik, dan bahkan hanya meraup keuntungan yang kecil dari tersedianya akses ke pemerintah yang lebih terbuka.

Hegemoni sosial-budaya yang secara sekilas nampaknya merupakan

tujuan dari perselisihan tersebut ternyata bukanlah tujuan akhir dari keduanya. Perbenturan antara budaya lokal versus Islam adalah hal yang nampak di permukaan dan dipahami secara parsial oleh masyarakat dan pihak-pihak yang menginginkan penyederhanaan masalah, di antaranya adalah pendukung kedua pihak yang berselisih. Di luar perbenturan itu, ada unsur-unsur politik yang lebih besar yang melandasi kepentingan kedua pihak, di antaranya adalah proses pencarian dan proses pembentukan politik identitas. Proses demokratisasi dan desentralisasi yang tengah dibangun oleh bangsa Indonesia memang menyediakan ruang yang besar bagi terciptanya manuver-manuver politik yang sering tersembunyi di balik sebuah perselisihan. Dedi Mulyadi dan Habib Rizieq telah berhasil memainkan peran mereka masing-masing sebagai simbol penjaga budaya lokal dan Islam yang diyakini warga yang pada akhirnya mewarnai proses perkembangan dan dinamika demokrasi pada masa pasca Orde Baru. Namun, ketika konsolidasi demokratik (*democratic consolidation*) ingin dicapai, persaingan politik identitas di Indonesia tidak akan menjadi "bumbu penyedap" yang membuat rasa masakan menjadi lebih enak. Ia justru akan membuat Indonesia kehilangan momentumnya sebagai negara yang sebenarnya dapat mencapai konsolidasi demokratik dengan baik.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

Antlöv, Hans. "Not Enough Politics! Power, Participation and the New Democratic Polity in Indonesia", *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

- Aspinall, Edward and Fealy, Greg. "Introduction: Decentralisation, Democratisation and the Rise of the Local", *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Atkinson, Jane Monnig. (1983). Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion. *American Ethnologist*, 10 (4), 684-696.
- Ayoob, Mohammed. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2011.
- Choi, Nankyung. "Local Political Elites in Indonesia: "Risers" and "Holdovers"". *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 29 (2), 364-407, 2014.
- Fung, Archon and Wright, Erik Olin, eds. *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*, London and New York: Verso, 2003.
- Hadiz, Vedi. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia Perspective*, Stanford: Stanford University Press, 2010.
- James, Pierre. "State Theories and New Order Indonesia", *State and Civil Society in Indonesia*, eds. Arief Budiman. Clayton: Centre for Southeast Asian Studies, Monash University, 1990.
- King, Dwight Y. *Half-Hearted Reform: Electoral Institutions and the Struggle for Democracy in Indonesia*, Westport: Praeger, 2003.
- Mackie, Jamie. "Patrimonialism: The New Order and Beyond", *Soeharto's New Order and its Legacy*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy. Canberra: ANU E Press, 2010.
- Malley, Michael. "Beyond Democratic Elections: Indonesia Embarks on a Protracted Transition". *Democratization*, 7(3), 153-180, 2000
- Malley, Michael. "New Rules, Old Structures and the Limits of Democratic Decentralisation", *Local Power and Politics in Indonesia: Decentralisation and Democratisation*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Mietzner, Marcus. "Indonesia's Direct Elections: Empowering the Electorate or Entrenching the New Order Oligarchy". *Soeharto's New Order and its Legacy*, eds. Edward Aspinall and Greg Fealy. Canberra: ANU E Press, 2010.
- Pratikno. "Political Parties in Pilkada: Some Problems for Democratic Consolidation", *Deepening Democracy in Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*, eds. Priyambudi Sulistiyono and Maribeth Erb. Singapore: ISEAS, 2009
- Pribadi, Yanwar. "The Klebun, the Kiai, and the Blater: Notes from Western Madura, Indonesia". *South East Asia Research*, 23 (3), 303-317, 2015.
- Qodari, M. "Indonesia's Quest for Accountable Governance". *Journal of Democracy*, 16(2), 73-87, 2005.
- Ramage, D. "Indonesia: Democracy First, Good Governance Later", *Southeast Asian Affairs 2007*, eds. D. Singhand L.C. Salazar. Singapore: ISEAS, 2007.
- Schulte Nordholt, Henk. "Renegotiating Boundaries: Access, Agency and Identity in Post-Soeharto Indonesia". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 159 (4), 550-589, 2003.

Schulte Nordholt, Henk. "Decentralisation in Indonesia: Less State, More Democracy?", *Politicising Democracy: The New Local Politics of Democratisation*, eds. John Harriss, Kristian Stokke and Olle Törnquist. Basingstoke [etc.]: Palgrave Macmillan, 2004.

Schulte Nordholt, Henk and Klinken, Gerry van. "Introduction". *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*, eds. Henk Schulte Nordholt and Gerry van Klinken. Leiden: KITLV Press, 2007.

Internet

<http://megapolitan.kompas.com/read/2015/11/26/08490071/Diprotes.karena.Pelesetkan.Sampurasun.Ini.Respons.Rizieq.Syihab>.

<http://regional.kompas.com/read/2015/11/26/05040061/Ramai.Dibicarakan.Ini.Makna.Sampurasun.Sesungguhnya>

<http://news.okezone.com/read/2015/11/26/525/1256154/kronologi-plesetan-sampurasun-hingga-pelaporan-ke-polda-jabar>.

<http://news.okezone.com/read/2015/11/27/525/1257151/ini-isi-ceramah-habib-rizieq-saat-plesetkan-sampurasun?page=1>.